

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif universal merupakan terjemahan dari *civic education* atau *citizenship education*. Makna *civics* diartikan sebagai studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara (Mtsweni, 2011). Penyebutan dengan nama *citizenship education* atau *education for citizenship* bermakna pengertian pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, juga dalam media. Seperti dituangkan dalam *Cypriot Journal Educational Science*, yang berjudul “*The Implementation of Balinese Folklife-Based Civic Education For Strengthening Character Education*” Vol. 16, issue 1:

“Civic education instructions have to be able to empower students to master and understand facts, data, concepts and generalisation in one body structure of civic education that covers political education materials, law awareness education, value education, moral education, character education, the education of the history of the nation’s struggles, ideology education and social education generally” (Sanjaya et al., 2021).

Secara spesifik di Indonesia disebut mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kedepannya setelah dewasa mampu berperan aktif dalam masyarakatnya (Sanjaya et al., 2021). Hal tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia (Pasal 37). Nama PKn selanjutnya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), namun memiliki tujuan yang sama yakni menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), semangat Bhinneka

Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2013 pasal 77 J ayat 1)

Secara konkrit, mengenai kedudukan mata pelajaran PPKn dituangkan dalam *international journal for education and vocational studies*, yang berjudul “*Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia*” Vol. 1, No. 5, bahwa: “*Pancasila and Citizenship Education (PPKn) as the Indonesian version of the Civic education which has a function in empowering citizens in every life of the nation and state based on Pancasila* (Dewantara et al., 2019)”. Dengan demikian PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang didalamnya mengandung pendidikan nilai, moral atau moral Pancasila dan pengembangan kapasitas kewarganegaraan Indonesia yang koheren (runtut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan perilaku atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dapat mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meskipun terjadi perubahan nama mata pelajaran PKn menjadi PPKn, ruang lingkup materi yang disajikan secara umum memiliki kesamaan, diantaranya meliputi materi: persatuan dan kesatuan, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia (HAM), kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan politik, kedudukan Pancasila, globalisasi (Murdiono, 2012). Secara resmi melalui Permendikbud No. 58, Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 di SMP/MTS, menegaskan mengenai ruang lingkup materi PPKn, yang meliputi:

1. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan akhir dari bentuk Negara Republik Indonesia.
4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan sebagai landasan yang mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Lampiran 1).

Lingkup kajian materi tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi PPKn. Kompetensi PPKn secara keseluruhan mencakup tiga aspek pokok, antara lain: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill*

(kecakapan kewarganegaraan), *civic disposition* (watak kewarganegaraan) (Branson dalam Heryana, 2019). Secara lebih jelas dituangkan dalam *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, yang berjudul “*Encouraging Civic Knowledge and Engagement: Exploring Current Events through a Psychological Lens, Vol. 16, No. 2: “Civic education might best be described as the ways in which we prepare our young to undertake the role of citizens by providing them with the knowledge and skills necessary to participate in the democratic process* (Patrick in Van Camp & Baugh, 2016). *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dalam proses pembelajarannya berkaitan dengan materi demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (Winarno dalam Susanto & Komalasari, 2015). Sedang *civic skill* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisn dalam Mulyono, 2017). Sedangkan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) merupakan salah satu komponen PKn yang merupakan terjemahan dari watak, sikap atau karakter kewarganegaraan (Arif, 2016).

Tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) merupakan bagian dari salah satu kompetensi PPKn, yakni watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Hal tersebut karena *civic responsibility* memuat mengenai watak, sikap, atau perilaku tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tanggung jawab merupakan perilaku yang menentukan bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi, yang menentukan beberapa keputusan yang bersifat moral (Ramdhan, 2017). Tujuan utama dikembangkan kompetensi *civic disposition* untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson dalam Mulyono, 2017).

Mata Pelajaran PPKn memuat kompetensi mengenai sikap atau karakter tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) dan kebajikan (*virtue*) selaku warga negara (Rohani, 2015). Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku (Nurmalina dan Syaifullah dalam Rohani, 2015). Tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dapat dibangun melalui pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran PPKn yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Penguatan kompetensi *civic responsibility* dapat dilakukan dengan cara pembiasaan pada diri sendiri. Pembiasaan seperti berbuat baik, berlaku jujur, bertanggung jawab, menghindari perbuatan curang, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan sebagainya. Karakter tanggung jawab tidak terbentuk secara instan, tetapi harus dilatih secara terus menerus agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal (Ningrum et al., 2020). Seperti halnya di sekolah, karakter tanggung jawab sangat penting untuk ditanamkan pada diri peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang baik. Dengan adanya tanggung jawab, maka peserta didik akan memiliki beban yang harus diselesaikan terkait dengan amanah atau masalah yang sedang di alami. Dengan adanya penguatan karakter tanggung jawab (*civic responsibility*) pada peserta didik, maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Subhi, 2014).

Penguatan Kompetensi PPKn, termasuk *civic responsibility*, melalui proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui strategi pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru di dalam kelas. Strategi Pembelajaran merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung (Solihatini dalam Hamruni, 2012). Melalui penerapan dan pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat, pembelajaran PPKn akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan

sehingga tujuan pembelajaran dapat mudah tercapai. Strategi pembelajaran merupakan komponen-komponen dari materi pembelajaran termasuk berbagai aktivitas sebelum pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan pada kegiatan selanjutnya (Dick dan Carey dalam Hamruni, 2012).

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru di dalam kelas untuk pengembangan kompetensi *civic responsibility* atau tanggung jawab pada siswa adalah strategi *card sort* (Rohmatin, 2019). Strategi pembelajaran *card sort* merupakan kegiatan pembelajaran kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi (Siberman, 2006). Secara teknis, strategi pembelajaran *card sort* menggunakan potongan-potongan kertas yang dibentuk kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran, siswa diminta menyatukan potongan kertas sesuai dengan permintaan yang dirumuskan (Marisa, 2021). Secara jelas dituangkan dalam *Journal Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, yang berjudul "*Active Learning: Type of Card Sort to Enhance Students Achievement*", Vol. 323:

"Active learning directs students to always do meaningful, experienced learning and also think about what they can do during the learning process. Active learning has various types. One of the types is convenient to apply, namely active learning card sort. The stages of sorting cards for the type of active learning card sort starting from the teacher uses card media that contains information that distributed to students later, so that students will try to find another card of the same category. By applying this Sorting active learning cards makes students' motor skills better dominant, so that students do not feel bored and expected so that students are able to understand and master the material because they learn from direct experience" (Puspitarini et al., 2019).

Strategi pembelajaran ini memiliki kelebihan yaitu dapat membantu menggairahkan siswa yang merasa jenuh atau lelah terhadap pelajaran yang diberikan (Siberman, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Miduansah (2021), dalam proses pembelajaran PPKn di dalam kelas ditemukan siswa kurang terlibat atau belum berpartisipasi secara aktif, juga sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Permasalahan dalam proses pembelajaran PPKn yang berkaitan langsung dengan kompetensi *civic responsibility* atau tanggung jawab pada siswa yaitu tanggung jawab keseharian yang masih sering dilanggar. Sedangkan, jika dikaitkan dengan pengembangan kompetensi *civic responsibility* sebaiknya siswa menunjukkan sikap tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik di sekolah, mengerjakan tugas dan mendengarkan arahan dari guru baik ketika sedang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Hairunisa (2019), ditemukan permasalahan ketika guru memberikan tugas pada siswa, banyak siswa yang belum mengembangkan sikap tanggung jawab (*civic responsibility*) seperti kurangnya perhatian siswa terhadap tugas yang diberikan, sifat malas pada diri siswa, pergaulan, dan pengaruh teknologi. Jika dikaitkan dengan kompetensi *civic responsibility* dalam pembelajaran PPKn, siswa sebaiknya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Pemaparan materi pembelajaran dan pemberian tugas oleh guru dengan tujuan untuk mengembangkan tanggung jawab pada siswa ternyata menimbulkan kesenjangan. Materi dan tugas yang diberikan oleh guru seharusnya dapat mengembangkan tanggung jawab siswa terhadap tugasnya tetapi, justru menimbulkan suatu permasalahan. Dalam membentuk dan membangun siswa yang bermartabat, cerdas dan kreatif peserta didik harus memiliki sikap tanggung jawab. Ketika guru memberikan tugas pada siswa, tentu guru akan mengetahui sikap tanggung jawab dari masing-masing siswa. Siswa yang bertanggung jawab pada tugas atau dalam hal kegiatan tertentu cenderung akan menyelesaikannya tepat waktu (Wicaksana, 2016). Sejalan dengan penelitian di atas, peneliti juga melihat fakta di lapangan ketika sedang melaksanakan magang. Peneliti mengamati dan menilai bahwa ditemukan beberapa siswa yang belum sepenuhnya mengembangkan sikap tanggung jawab. Ketika pembelajaran PPKn sedang berlangsung, ditemukan beberapa siswa yang kurang memperhatikan guru yang sedang mengajar di depan kelas dan tidak fokus ketika mengerjakan tugas. Pengalaman yang dialami oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suri, (2018), menyatakan bahwa siswa sering mengerjakan tugas tidak sesuai

dengan batas yang ditentukan oleh guru dengan alasan lupa untuk mengerjakan dan banyak siswa yang kurang memperhatikan guru ketika menerangkan di depan kelas. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran siswa untuk bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran di kelas.

Penelitian ini menarik untuk diteliti akibat adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas. Dilaksanakannya penelitian dengan subjek dan objek yang berbeda sehingga akan memberikan tantangan baru bagi peneliti untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di lapangan. Penelitian ini akan membahas mengenai pengembangan kompetensi *civic responsibility* dalam proses pembelajaran PPKn melalui strategi *card sort*.

Relevansi penelitian ini dengan peneliti sebagai mahasiswa PPKn adalah berhubungan dengan pengembangan karakter tanggung jawab warga negara, dimana *civic responsibility* ini sejalan dengan tujuan mata pelajaran PPKn yaitu membentuk warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Kompetensi *civic responsibility* juga mempunyai hubungan erat dengan mata kuliah yang ada di program studi PPKn yaitu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa. Salah satu karakter dimaksud adalah karakter tanggung jawab. Karakter tanggung jawab pada siswa dapat dikembangkan dengan salah satunya menggunakan strategi pembelajaran yaitu *card sort*. Dengan menggunakan strategi *card sort* dalam pembelajaran PPKn, dapat dengan mudah untuk mengamati dan mengembangkan karakter tanggung jawab pada siswa, karena strategi *card sort* dilakukan secara berkelompok dan mandiri, serta berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu peneliti memilih strategi pembelajaran *card sort* yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn untuk mengembangkan kompetensi *civic responsibility*.

Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti, dengan melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) (Asmani, 2016). Berupaya menanamkan dan mengembangkan nilai karakter kepada peserta didik sehingga mereka memiliki karakter yang luhur, menerapkan dan

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Akbal, 2016). Seperti dituangkan dalam *Journal Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives*, yang berjudul “*Improving Emirati students’ social responsibility competence through global citizenship education*” Vol.17, issue 2:

“*A global citizenship education curriculum fosters social responsibility, character development, and academic skills needed in service-learning. The global consciousness approach to global citizenship education comprises the promotion of students’ global orientation, empathy and cultural sensitivity. It empowers students to solve social challenges to create a more inclusive, tolerant and sustainable world*” (Wren, 2021).

Ditegaskan bahwa PKn secara global telah membentuk tanggung jawab sosial, pengembangan karakter, dan keterampilan akademik yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat memecahkan tantangan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Karakter tanggung jawab warga negara erat kaitannya dengan *civic responsibility*, karenanya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengembangan Kompetensi *Civic Responsibility* dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Strategi *Card Sort* Studi Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban. Penelitian ini sangat penting karena berkaitan dengan pengembangan *civic responsibility* melalui strategi *card sort* yang berbeda dari penelitian terdahulu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban?
2. Apa kendala pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban?
3. Apa solusi dari kendala pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban.
2. Mendeskripsikan kendala pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban.
3. Mendeskripsikan solusi dari kendala pengembangan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membentuk karakter tanggung jawab dan peduli sosial pada siswa melalui strategi pembelajaran *Card Sort* yang diterapkan oleh guru PPKn ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka, acuan, atau bahan untuk penelitian lanjutan, menjadi perbandingan, dan tujuan lain yang relevan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil ataupun membuat suatu kebijakan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui strategi *Card Sort* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai input bagi kepala sekolah dalam memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program-program dan kebijakan sekolah, serta untuk meningkatkan semangat guru dalam mendidik dan membimbing siswa agar lebih baik.

b. Bagi Guru

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi guru untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya dalam mengembangkan berbagai macam strategi pembelajaran, salah satunya ialah strategi *Card Sort* yang dapat dijadikan sarana dalam pembentukan karakter tanggung jawab pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban.

c. Bagi Peserta Didik atau Siswa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi siswa agar lebih sadar dan mampu menjadi pribadi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kompetensi *Civic Responsibility* dimana berarti berkaitan dengan karakter tanggung jawab siswa.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana cara mengembangkan kompetensi *Civic Responsibility* dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Strategi *Card Sort*.

e. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau rujukan untuk penelitian berikutnya.